

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang dilakukan secara rutin dalam kurun waktu yang ditentukan (Fuady, 2010). Setiap warga negara yang sudah dewasa berhak mengikuti pemilu yang berjalan secara adil dan bebas (Acemoglu, 2009). Pemilu juga dipandang sebagai bentuk paling dasar dan terpenting dari demokrasi.

North (1990:36) menekankan pentingnya rasa percaya dalam pembangunan dan demokrasi. Rasa percaya (*trust*) kepada pemerintah menimbulkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan politik dan pembuatan kebijakan publik yang baik (Krishna, 2002a). Adanya rasa percaya kepada pemerintah, kinerja aparatur pemerintahan dan sistem kelembagaan yang baik, serta tatanan kelembagaan secara menyeluruh berperan pada perkembangan proses demokrasi (Huntington, 1970; Kohli, 1990). Hak-hak yang dijamin secara konstitusional dapat ditegakkan, kebutuhan individu dan rumah tangga akan layanan publik dapat dikomunikasikan lebih baik (*accountable, transparency*). Dalam konteks ekonomi kelembagaan baru, rasa percaya merupakan komponen pelengkap sekaligus pengganti bagi *input* utama pembangunan di negara-negara berkembang yang umumnya mengalami keterbatasan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan modal (*credit constraint*). Di wilayah/negara dengan rasa percaya yang tinggi namun tidak mendapat pelayanan keuangan yang baik, rasa percaya akan berfungsi sebagai komplemen

dari kebijakan publik. Bila dianalogikan dengan kehidupan masyarakat desa di Indonesia, adanya kegiatan lembaga keuangan non formal simpan pinjam perempuan merupakan salah satu bentuk implementasi rasa percaya di masyarakat terhadap komunitasnya pada bidang ekonomi.

Kemampuan negara sebagai institusi dalam melaksanakan undang-undang dan hukum yang baik diharapkan akan meningkatkan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan perencanaan pembangunan. Partisipasi ini diwujudkan dalam keikutsertaan warga masyarakat dalam proses pemilu. Dalam jangka panjang, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diharapkan berkorelasi dengan *good quality of government*. Peran serta dalam pembangunan secara tidak langsung diharapkan meningkatkan produktivitas kerja masyarakat. Kesejahteraan penduduk secara tidak langsung meningkat apabila produktivitas kerja individu dan tenaga kerja membaik. Dengan kalimat lain, secara akumulatif hal tersebut akan berdampak terhadap *output* nasional atau PDB sebuah negara.

Sikap saling percaya dan saling menghormati dapat meningkatkan kinerja institusi pemerintahan (Fukuyama, 2014). Individu akan bertindak secara rasional untuk mencapai tujuan dengan hasil terbaik (Coleman & Fararo, 1992). Rasa percaya (*trust*) baik pada sesama warga masyarakat maupun pada pemerintah dapat menjadi salah satu komponen individu berperilaku rasional. Hal ini bisa dikaitkan dengan teori permainan *Prisoner Dilemma*. Rendahnya rasa percaya dan informasi yang tidak lengkap mendorong individu berperilaku individualis.

Dalam konteks partisipasi politik atau partisipasi dalam pemilu, pemilih yang mempunyai rasa percaya yang baik cenderung rasional dan akan memilih wakil rakyat dengan latar belakang rekam jejak yang baik pula, dibanding hanya berdasarkan minat personal. Penelitian mengenai pemilihan anggota parlemen di Italia menunjukkan untuk daerah-daerah dengan rasa percaya yang tinggi cenderung untuk tidak memilih calon anggota parlemen dengan rekam jejak yang buruk (Fukuyama, 2014). Sejalan dengan hasil penelitian tersebut Diamond (1993) menyatakan demokrasi akan tumbuh pada budaya politik yang menjunjung: (i) toleransi terhadap pihak yang berseberangan secara posisi, politik, maupun sosial budaya; (ii) fleksibilitas; (iii) rasa percaya (*trust*) terhadap pelaku politik lain; (iv) kerelaan untuk berkompromi; dan (v) penghargaan terhadap pandangan yang berbeda.

Rahn et al. (1999) menyatakan institusi yang efektif dan berlaku adil dalam mengalokasikan sumber daya turut berkontribusi terhadap rasa saling percaya (*trust*), norma-norma (*norms*), dan jejaring sosial (*networks*) yang memungkinkan masyarakat melakukan pemecahan sejumlah permasalahan bersama. Pelaksanaan undang-undang dan hukum yang baik oleh institusi akan meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan kegiatan perekonomian dan melakukan perencanaan demi masa depan, sehingga produktivitas maupun kesejahteraannya akan meningkat. Secara akumulatif hal tersebut akan berdampak terhadap *output* nasional atau negara yang juga akan semakin meningkat.

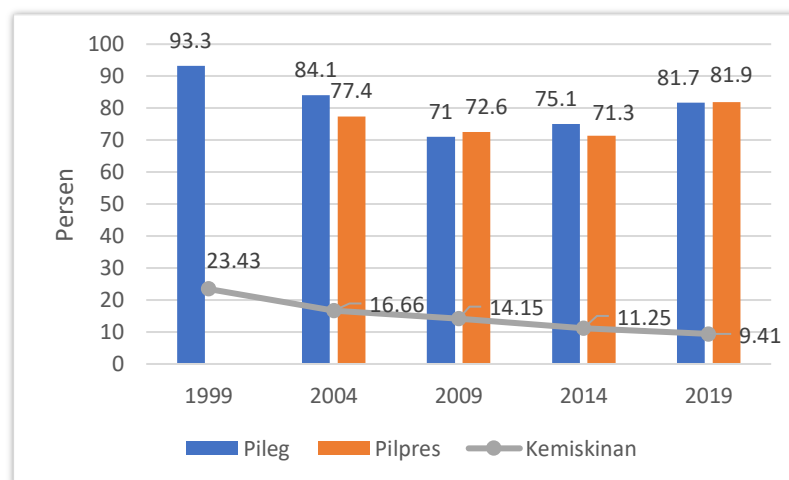
Turunnya tingkat kepercayaan warga negara terhadap pemerintahannya telah menimbulkan tantangan baru dalam pembangunan (Azab & ElSherif, 2018).

Pada tahun 2016, secara empiris ditemukan bahwa hanya 42 persen penduduk di negara-negara anggota OECD yang mempercayai pemerintahnya (OECD, 2017). Kurangnya kepercayaan dapat memengaruhi secara negatif atau disproportional cara orang memandang dan bereaksi terhadap kebijakan dan peraturan publik. Hal tersebut juga dapat membatasi penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk tindakan kolektif (Scholz & Pinney, 1995). Hal yang lebih buruk adalah kondisi di atas dapat membahayakan seluruh kredibilitas pemerintah (Braithwaite & Levi, 1998). Menurunnya kepercayaan pada pemerintah dikaitkan dengan perubahan ekonomi (Derek, 1997). Semakin baik aktivitas ekonomi dalam arti aktivitas yang berorientasi pertukaran, semakin rasional individu dalam melakukan interaksi. Kinerja program pemerintah yang rendah cenderung disikapi dengan kritik dan berkurangnya dukungan masyarakat dalam berbagai program pemerintah (Garry, 1997). Penelitian lain menemukan bahwa pengeluaran pemerintah cenderung menjadi kurang efisien dalam wilayah yang tidak mempunyai modal sosial yang memadai. Alokasi sumber daya dalam ekonomi juga menjadi salah sasaran (Baldassare, 2000). Selain itu, modal sosial yang rendah terbukti menjadi penyebab turunnya kepercayaan pada pemerintah (Keele, 2007).

Penelitian yang mengkaji hubungan antara rasa percaya kepada pemerintah dan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik sudah banyak dilakukan. Kesimpulan umum dari studi-studi tersebut menyatakan bahwa hubungan antara rasa percaya kepada pemerintah dan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik belum dapat mengarah pada satu kesepakatan. Terdapat argumen yang menyatakan bahwa rasa percaya kepada pemerintah berkorelasi

positif terhadap partisipasi masyarakat dalam politik (Back & Christensen, 2016; Bevelander & Pendakur, 2009, 2011; Krishna, 2002; Nannicini et al., 2013; Yamamura, 2011). Pendapat lain menyatakan terdapat hubungan negatif antara rasa percaya kepada pemerintah dan partisipasi politik masyarakat (Caillier, 2010; Hooghe & Dassonneville, 2018).

Indonesia sebagai negara berkembang cukup berhasil dalam melakukan upaya pengentasan kemiskinan. Persentase penduduk miskin semakin berkurang dari tahun ke tahun, bahkan pada tahun 2018 angka kemiskinan mencapai 9,82 persen (BPS, 2019). Kesejahteraan masyarakat yang meningkat seharusnya membuat masyarakat lebih berpartisipasi dalam pembangunan karena waktu yang semula digunakan untuk mendapatkan penghasilan tambahan bisa dialokasikan ke dalam kegiatan lain (Glaeser, et al., 2002). Namun, di tengah meningkatnya kesejahteraan rakyat terdapat fenomena menarik, terjadi penurunan partisipasi warga negara dalam pemilihan umum di Indonesia (Gambar 1.1).



Sumber: Bappenas (2019), BPS (2019)

Gambar 1.1 Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Kemiskinan 1999-2019

Berdasarkan laporan RPJMN 2020-2024 terlihat bahwa pada tahun 1999 di awal reformasi, partisipasi pemilih legislatif masih sebesar 93,3 persen. Pada pemilu tahun 2019, partisipasi pemilih pada pemilu legislatif turun menjadi 81,7 persen, sedangkan partisipasi pemilih pada pilpres sebesar 81,9 persen (Bappenas, 2019).

Penelitian mengenai rasa percaya dan demokrasi di Indonesia saat ini kebanyakan masih berkisar tentang peran rasa percaya dalam kemenangan calon kepala daerah tertentu. Sepengetahuan penulis masih sangat sedikit yang melakukan penelitian mengenai pengaruh kemiskinan dan rasa percaya masyarakat kepada pemerintah terhadap keputusan untuk memilih dalam pemilihan umum. Studi-studi mengenai modal sosial dan demokrasi lebih banyak menggunakan analisis kualitatif dengan metode *depth interview* dan analisis regresi berganda.

Berdasarkan hal tersebut menjadi penting untuk dilakukan penelitian mengenai bagaimana hubungan kemiskinan, dan rasa percaya masyarakat kepada pemerintah terhadap keputusan memilih masyarakat dalam pelaksanaan pemilu. Dalam penelitian ini rasa percaya kepada pemerintah diwakili dengan rasa percaya kepada presiden dan anggota legislatif. Partisipasi politik merupakan suatu konsep yang sangat umum. Deth (2016) menyatakan partisipasi politik merupakan seluruh kegiatan warga negara yang berkaitan dengan politik, seperti keikutsertaan memilih dalam pemilu, demonstrasi, berhubungan dengan aparat publik, kegiatan boikot, mengikuti kampanye partai, menjadi sukarelawan, menandatangani petisi dan masih banyak lagi. Partisipasi politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keputusan individu untuk memilih dalam pemilu presiden dan anggota legislatif.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan berbagai fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian ini, ada beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah karakteristik sosial ekonomi, demografi masyarakat (pendidikan, status pekerjaan, pengeluaran, daerah tempat tinggal, umur, dan status perkawinan) berpengaruh terhadap rasa percaya kepada pemerintah (presiden dan anggota legislatif)?
2. Apakah kemiskinan, rasa percaya kepada pemerintah (presiden dan anggota legislatif) dan karakteristik sosial ekonomi, demografi (pendidikan, status pekerjaan, pengeluaran, daerah tempat tinggal, umur, dan status perkawinan) berpengaruh terhadap keputusan masyarakat untuk memilih dalam pemilu presiden dan anggota legislatif?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diuraikan tujuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh karakteristik sosial ekonomi, demografi masyarakat (pendidikan, status pekerjaan, pengeluaran, daerah tempat tinggal, umur, dan status perkawinan) terhadap rasa percaya kepada pemerintah (presiden dan anggota legislatif).
2. Menguji dan menganalisis pengaruh kemiskinan, rasa percaya kepada pemerintah (presiden dan anggota legislatif) serta karakteristik sosial ekonomi, demografi, (pendidikan, status pekerjaan, pengeluaran, daerah

tempat tinggal, umur, status perkawinan) terhadap keputusan masyarakat untuk memilih dalam pemilu presiden dan anggota legislatif.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Diharapkan analisis dalam penelitian ini mampu memberikan gambaran kondisi kemiskinan, rasa percaya masyarakat kepada pemerintah dan demokrasi di Indonesia. Pemerintah pusat maupun daerah selaku pengambil kebijakan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai salah satu *input* dalam rangka merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program pembangunan nasional. Selain itu diharapkan penelitian ini mampu menambah referensi penelitian terkait rasa percaya kepada pemerintah dan keputusan untuk memilih dalam pemilu khususnya di Indonesia.

#### **1.5 Lingkup Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif untuk menganalisis hubungan antarvariabel penelitian dengan menggunakan dua alat analisis. Analisis pertama, regresi probit biner digunakan untuk menguji dan menganalisis determinan dari rasa percaya kepada pemerintah (presiden dan legislatif). Analisis kedua, regresi probit dengan variabel instrument digunakan untuk menguji dan menganalisis hubungan antara kemiskinan, rasa percaya kepada pemerintah, serta kondisi sosial ekonomi, dan demografi rumah tangga terhadap keputusan masyarakat untuk memilih dalam pemilihan umum. Penelitian ini menggunakan data mikro hasil Susenas Modul Hansos tahun 2014 oleh BPS yang dilaksanakan



pada bulan September tahun 2014. Data Susenas Hansos mencakup jumlah sampel Susenas triwulan 3 tahun 2014 sebanyak 7.500 blok sensus yang terdiri dari 75.000 rumah tangga. Sampel Susenas tersebar secara merata di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

### **1.6 Sistematika Tesis**

Penelitian ini disajikan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan memaparkan latar belakang permasalahan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 Tinjauan pustaka berisi landasan teori dan studi empiris hasil penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian, serta kerangka pikir dan hipotesis penelitian.

Bab 3 Metode penelitian berisi jenis penelitian, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan.

Bab 4 Hasil dan pembahasan menyajikan rangkuman hasil pengolahan data, analisis deskriptif dan inferensia.

Bab 5 Kesimpulan berisi pokok hasil penelitian, saran terkait penelitian, serta keterbatasan penelitian.